

BAB III
KONFLIK DAN KERUKUNAN
DALAM *PARTA KRAMA* KARYA UMAR KAYAM

Kebudayaan adalah suatu sistem yang mempunyai nilai-nilai koherensi dengan konsep-konsep epistemologi dari sistem masyarakatnya. Keberadaan kebudayaan demikian menyebabkan tingkah laku dan sikap manusia di masyarakat harus sesuai dengan tata cara atau nilai-nilai dari sistem yang ada sehingga secara pragmatis tindakannya tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan.

Dalam masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan suatu aturan yang harus ditaati dalam bertingkah laku. Bagaimana masyarakat hidup, bersosialisasi, memutuskan masalah sampai dengan hal-hal yang kecil seperti status sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu bagaimana bentuk rumah, pemberian nama, dan gaya hidup. Hal demikian sudah menjadi aturan baku yang harus diaplikasikan dan dipergunakan. Tindakan dan tingkah laku yang menyeleweng dari aturan yang telah ditentukan dianggap sebagai tindakan yang irasional, yang akan menyebabkan terganggunya hubungan dalam masyarakat.

Dalam bab ini sebelum membicarakan mengenai konflik dan kerukunan, lebih lanjut harus dipahami gambaran secara global mengenai kebudayaan Jawa. Hal ini disebabkan karena untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat mempunyai “benang merah” dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Jawa. Melalui pemahaman mengenai kebudayaan



Jawa, kita akan mengetahui karakter-karakter dari orang dan masyarakat serta sikap-sikap yang menjadi dasar hidup mereka. Yang lebih penting adalah bagaimana pandangan hidup masyarakat mengenai kerukunan dalam mengemas setiap konflik yang timbul.

Dengan mencermati pandangan hidup yang tercermin dalam kebudayaan Jawa, kita akan memiliki integritas dalam melihat masyarakat Jawa secara menyeluruh dan sangat kompleks.

3.1 Kebudayaan Jawa

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta ‘ buddjayah ‘ yang berarti akal budi. Budaya adalah kekuatan batin dalam upaya yang menuju kebaikan (Koentjaraningrat, 1987:19).

Kebudayaan adalah hasil cipta akal budi manusia seperti kesenian, kepercayaan, adat istiadat. Kebudayaan juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan dan sebagai pedoman tingkah laku. Kebudayaan Jawa berarti hasil penciptaan akal budi dari manusia Jawa.

Secara etnografis, suku Jawa adalah mayoritas penduduknya di Indonesia. Mereka kebanyakan tinggal dan hidup di pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Dalam kehidupannya, orang Jawa mengenal pelapisan sosial. Konsep ini erat kaitannya dengan derajat seseorang yang ditentukan oleh keturunan kerabat, tingkat ekonomi, pangkat, dan pendidikan. Di dalam konsep pelapisan sosial ini dikenal dua macam sistem yaitu: pertama, sistem pelapisan tertutup, yang

terbentuk oleh adat tata cara masyarakat yang menyebabkan status dan kedudukan seseorang tidak akan goyah. Kedua, adalah sistem pelapisan terbuka, yakni sistem yang tertutup oleh adat. Dalam sistem pelapisan terbuka, orang masih dimungkinkan untuk merubah status ke atas atau ke bawah dengan gelar yang dimiliki, misalnya ekonomi dan pendidikan.

Secara umum, masyarakat Jawa dibedakan dalam dua golongan sosial yaitu priyayi atau bangsawan dan *kawula alit* atau rakyat jelata. Masyarakat Jawa juga digolongkan atas dasar ketaatannya beribadat. Kedua golongan itu adalah *santri* dan *abangan*. Namun dalam golongan apapun orang Jawa dengan ciri khasnya yang tercermin dalam sikap mereka menghadapi pelbagai segi kehidupan.

Golongan priyayi adalah kaum elit dalam stratifikasi masyarakat tradisional dan masyarakat kolonial yang dengan pelbagai cara membedakan diri dari rakyat kebanyakan. Priyayi adalah kelompok sosial dari keturunan bangsawan atau rakyat biasa yang mempunyai tingkah laku dan nilai warisan keraton masa lalu. Kelompok ini pada masa sebelum Perang Dunia II menjadi pemegang kekuasaan, maka pola kebudayaannya pernah menjadi pola umum tingkah laku dan pandangan hidupnya menjadi ukuran umum bagi tingkah laku dan pandangan hidup yang baik dan ideal.

Ciri-ciri membedakan golongan priyayi dengan rakyat kebanyakan tidak hanya adat sopan santun dan bahasa tetapi juga berupa hal-hal yang berwujud konkret seperti: bentuk rumah kediaman, pakaian resmi, gelar, dan sebagainya.

Dari bentuk rumah, pakaian, gelar namaya dengan sepintas lalu dapat diidentifikasi kepriyayan seseorang.

Salah satu faktor yang menjadi petunjuk utama status adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah sesuatu totalitas dari pelbagai tata cara, adat kebiasaan, struktur kelakuan, kompleks lambang-lambang, sikap hidup serta mentalitas dari suatu golongan sosial yang secara menyeluruh mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Sartono, 1987:53). Menurut Geertz (1989:309) bahwa ukuran yang biasa digunakan untuk membedakan priyayi dan bukan priyayi adalah kekayaan, gaya hidup, dan keturunan. Gaya hidup meliputi pakaian yang mereka kenakan, rumah tinggal mereka, caranya mereka bertingkah laku; dengan sikap bergaul, karena priyayi hanya bergaul secara eksklusif dengan sesama priyayi.

Simbol status sebagai nilai ternyata sangat esensial bagi kehidupan priyayi, sehingga sangat menentukan pelbagai aktivitas sekitar siklus keluarga. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi dikesampaikan dengan segala akibatnya.

Nama menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat Jawa. Adat istiadat memberi nama pada anak tergantung tingkat sosial orang tua. Orang Jawa tahu nama yang tidak layak bagi anak-anaknya. Seorang petani tidak akan memberi nama akhir pada anaknya dengan kata *kusuma*, *ningrat*, *negoro* dan sebagainya, karena nama itu hanya untuk golongan priyayi. Petani biasanya memberikan nama anaknya singkat saja berdasarkan hari pasaran atau nama lain yang umum. Masyarakat Jawa percaya, nama punya makna yang dalam. Karena itu orang tua tidak akan sembarangan memberikan nama pada anaknya.

Golongan rakyat kebanyakan tidak memiliki peraturan yang rumit mengenai bentuk rumah, nama, adat istiadat. Aturan yang mengikat golongan priyayi banyak yang tidak berlaku bagi golongan rakyat kebanyakan. Rakyat kebanyakan hidup lebih beda dan lebih sederhana.

Dalam tingkah laku pun tidak ada ikatan yang mengikat rakyat kebanyakan. Mereka makan, minum, bekerja, dan berbicara secara seenaknya. Tidak seperti para bangsawan yang begitu rumit dan penuh aturan dalam bertingkah laku dan berbicara.

Secara umum, di dalam diri manusia Jawa, terdapat sikap *rumangsang*, *tepa slira*, mawas diri, dan budi luhur. Selain itu, didalam diri orang Jawa terdapat sikap dan yang negatif seperti fatalistik, feodalistik, dan kelemahan dalam mengambil keputusan.

Nilai budaya Jawa yang menentukan tingkah laku bagi orang Jawa dalam hubungan sosial adalah sikap hormat. Hormat adalah titik lemah antara pelbagai perasaan individu Jawa yang timbul bila berhadapan dengan orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukan .

Di dalam keluarga Jawa diajarkan untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan seperti: belas kasihan, kebaikan, kemurahan hati, rasa tanggung jawab, dan sebagainya. Setiap anggota keluarga mengalami sikap *sepi ing pamrih* yaitu suatu sikap yang tidak ingin memaksakan suatu kehendak dan kepentingan sendiri dengan memperhatikan kepentingan bersama. Keluarga adalah tempat berkembangnya suatu perasaan moral praktis yang amat mendalam dan tidak memerlukan legitimasi teoretis.

Jadi, keluarga bagi masyarakat Jawa adalah “guru pertama” yang mengajarkan cara berpikir, berperasaan dan bersikap menghadapi realita. Bagi setiap orang Jawa, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak adalah orang-orang yang terpenting di dunia ini. Mereka itulah yang memberikan kesejahteraan emosional dan titik keseimbangan dalam orientasi sosial.

Ada dua yang menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Pertama, kaidah yang mengatakan bahwa setiap situasi manusia hendaknya bersikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kaidah kedua, adalah kerukunan atas masyarakat agar selalu harmonis, selaras, tenang, dan tentram tanpa perselisihan serta pertentangan. Kedua kaidah tersebut (sikap hormat dan kerukunan) menuntut seseorang selalu menguasai perasaan-perasaan dan keinginan serta nafsu dengan menormorduakan kepentingan pribadi demi mempertahankan keselarasan masyarakatnya.

Dari sini tampak bahwa salah satu ciri khas orang Jawa yang menarik untuk disimak adalah bahwa manusia Jawa memiliki kesadaran yang kuat tentang arti kebudayaan bagi kehidupan sosial.

Dasar pemikiran orang Jawa adalah membangun sikap batin yang sesuai. Tetapi, karena segi lahiriah manusia melukiskan kekacauan, dengan demikian akan menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan mencegah dua macam bahaya yang disebabkan oleh kebutuhan lahiriah yaitu hawa nafsu, dan *pamrih*. Untuk mengatasi hawa nafsu dan *pamrih* manusia Jawa diharapkan memiliki keterkaitan dengan empat hal yakni. Pertama, sikap *éling*, yakni suatu sikap untuk selalu ingat asal usulnya. Kedua, sikap sabar, yang terwujud dalam

keadaan tidak tergesa-gesa, tidak khawatir dalam menghadapi sesuatu yang terjadi sudah semestinya terjadi. Ketiga, sikap *nrima*, yakni sikap wajar dalam menerima hidup yang menderita dan bisa membawa diri. Keempat, sikap ikhlas, yaitu merelakan segala sesuatu yang dimiliki, tidak egois yang tercermin dalam sikap budi yang luhur antara lain mempunyai kesanggupan untuk melepaskan milik kemampuannya jika hal itu menjadi tuntutan tanggung jawab atau nasibnya (Magnis Suseno, 1984:143).

Sikap keagamaan rata-rata manusia Jawa bersikap nominal. Dalam arti, tidak sepenuhnya salah, entah agama apapun yang dianut. Tentunya dengan pengecualian orang-orang yang memang benar-benar beriman dan sesuai dengan ajaran agamanya.

Filsafat Jawa sepanjang masa berkesimpulan bahwa Tuhan merupakan *Sangkan Paraning Dumadi*, dan *menungsa* yaitu usaha manusia untuk kembali kepada asalnya atau Tuhan yang dilakukan dengan jalan jasmani maupun rohani atau dengan jalan lahir maupun batin.

Manusia Jawa gemar melakukan mawas diri yang bersumber pada kesadaran atau kemampuannya berintrospeksi mengenai kekurangan-kekurangan sebagai makhluk di dunia. Ia merasa kecil selalu karena nasibnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka, pada dasarnya, sikap hidup manusia Jawa bersifat fatalistik, yaitu perbuatan baik membuahkan hasil yang baik pula.

Hidup keagamaan orang Jawa bersifat *dualisme*. Setiap peristiwa atau kejadian selalu diperingati dengan upacara ritual. Entah apa pun yang dianutnya tidak menunjukkan kemurnian atau aslinya sebagaimana ketika agama itu datang.

Sebab agama bagi orang Jawa merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penghayatan terhadap budayanya.

Konsep agama Jawa dalam Serat *Yasadipura* menyebutkan bahwa agama adalah cara untuk menemukan kemurnian jiwa dan kesempurnaan hidup dan usaha untuk menemukan dirinya dalam Tuhan. Tujuan agama itu merupakan jalan menuju cita-cita yang paling tinggi yaitu bersatu dengan Tuhan atau *Manunggaling Kawula Gusti* (Koentjaraningrat, 1984:318).

Sistem budaya agama Kejawen merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan kepada anak cucunya. Lewat ajaran Kejawen, manusia Jawa memperoleh banyak ajaran hidup yang selaras, termasuk di dalamnya hidup sederhana, sabar, dan *nrima* atau pasrah.

Gaya hidup Jawa yang terutama penting adalah seperti gaya hidup kebangsawan yang berasal dari kebudayaan keraton dan gaya hidup desa. Gaya hidup kebangsawanan yang berkembang jauh berlebihan mengalami perkembangan yang merana. Peragaan kekuasaan secara nyata dan persembahan dikurangi. Tata krama keraton yang selalu hadir disederhanakan, di lain pihak bentuk kehidupan bangsawan memberi nilai budaya yang bertahan dan membekas kuat pada seluruh rakyat terutama dipusat kebudayaan Jawa.

Budaya Jawa berkembang dari budaya keraton yang halus. Gaya hidup dan ajaran hidup tumbuh di dalam, kebudayaan keraton menjadi nilai-nilai ideal atau standar bagi orang Jawa dalam bertingkah laku.



3.2 Konflik dan Kerukunan dalam *Parta Kruma* Karya Umar Kayam.

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang paling problematik. Di satu pihak, konflik mempunyai dinamika interaksi untuk asal menundukkan, menindas, merusak, dan bahkan membunuh. Di pihak lain, ada pelbagai teori konflik tentang fungsi penting konflik dalam perkembangan suatu masyarakat. Menurut Magnis Suseno (1985 : 90), konflik berarti bahwa masing-masing pihak hendak mencapai tujuan tanpa memperhatikan kehendak, otonomi pihak lain. Konflik diputuskan bukan sesuai dengan keadilan atau menurut pihak-pihak yang terlibat, bukan sesuai dengan kebenaran atau kepalsuan, melainkan menurut “yang menang “ atau “ yang kalah “.

Menurutnya, konflik disebabkan karena adanya ketegangan emosional, kepentingan-kepentingan yang secara obyektif saling bertentangan atau pendapat-pendapat yang saling berlawanan. Konflik ini memuncak apabila terjadi tabrakan antarorang atau kelompok orang. Tabrakan dapat bersifat fisik (memukul, berkelahi). Bersifat rohani (memaksa orang lain agar tidak mengemukakan pendapat). Bersifat sosial (saling menekan atau memaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Hakikat konflik adalah percobaan untuk menghilangkan situasi dengan paksaan, dan kedua belah pihak mengambil jalan dengan memaksa.

Konflik adalah gangguan terhadap kerukunan. Untuk mencapai kerukunan, dalam masyarakat Jawa, memiliki etika konflik yang sangat fundamental, yaitu situasi yang berpotensi konflik harus dikelola dengan berorientasi pada ide

keadilan bukan melalui konflik. Pemecahan masalah berdasarkan keadilan adalah rasional, etis, dan efektif.

Wacana kerukunan terdapat pada semua pihak yang berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dan dalam suasana tenang dan sepakat. Bentuk rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam hubungan sosial, keluarga, rukun, tetangga, dan di desa.

Berlaku rukun berarti menghilangkan tanda ketegangan dalam masyarakat sehingga hubungan sosial tetap terlihat selaras. Rukun mengandung usaha terus menerus oleh semua individu untuk bersikap tenang satu sama lain dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan. Tuntutan kerukunan merupakan kaidah dalam menata masyarakat yang menyeluruh. Segala usaha yang dapat mengganggu keadaan kerukunan oleh suasana keselarasan dalam masyarakat harus dicegah.

Dalam keenam cerpen dari delapan cerpen yang termuat dalam kumpulan cerpen tersebut, Kayam menyoroti permasalahan sehari-hari yang dialami individu dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, yang secara tidak langsung sangat berpotensi membentuk konflik pada tiap individu yang saling bertentangan. Pandangan dunia pengarang yang termuat dalam keenam cerpen pada kumpulan cerpen *PK* secara garis besar memfokuskan pada lingkungan sosial masyarakat Jawa, sehingga cara-cara penyelesaiannya konflik lebih menitikberatkan pada pandangan etika kerukunan dalam menghasilkan suasana keselarasan.

Tokoh utama dan bawahan tiap-tiap cerpen yang saling berkepentingan dan bertentangan menyepakati mempergunakan kerukunan dan musyawarah dalam mengambil jalan tengah dan kehendak yang bulat guna meredam adanya konfrontasi langsung dari tiap individu. Pengelolaan konflik dirumuskan dengan tajam. Artinya suatu situasi yang berpotensi pada ide keadilan dan bukan melalui konflik. Pemecahan masalah melalui konflik tidak rasional dan tidak etis karena hanya menuruti pertimbangan kuat lemah, dan tidak stabil.

Cerpen "Ke Solo Ke Njati", tokoh utama (dia) yang bekerja sebagai pembantu ingin melakukan mudik bersama anak-anaknya, tetapi perjalanannya terganggu karena bus yang akan mereka tumpangi penuh sesak. Usaha tersebut dilakukan sampai dua kali, tetapi semuanya gagal. Dalam cerpen ini tokoh utama melakukan dua kali musyawarah. Pertama, musyawarah yang dilakukan dengan majikan untuk minta izin mudik.

" *Mbok* kamu jangan pulang Lebaran tahun ini, anak-anak saya pada kumpul disini. Banyak kerjaan ". Wah *nuwun sewu*, Bu . Saya sudah terlanjur janji anak-anak ". " Kalau kamu tidak mudik dan tetap masuk pasti banyak persen dari tamu-tamu. Ya. Tidak usah pulang ". " Wah *nuwun sewu*, Bu. Saya sudah terlanjur janji anak-anak". (KSKN:19)

Kedua, musyawarah yang dilakukan dengan anak-anaknya dalam menentukan alternatif liburan.

" Yaa, kita *nggak* jadi betul ke Njati ya, Bu ? " Ibunya melihat anak-anaknya dengan senyum yang dipaksakan. "

I ya, nak. *Nggak* apa ya ? Tahun depan kita coba lagi !

" Yaa . "

" Yaa. "

" I ya , dong. Ibu harus dikumpulkan uang lagi, kan ? "

" Memangnya sekarang sudah habis bu ? "

" Masih, masih. Tapi, hanya bisa ke kebun binatang.

Ke Njati tahun depan saj, ya ? "

Anak-anak itu mengangguk. (KSKN:21)

Begitu pula dengan yang dialami tokoh utama *Mbok Jah* dalam cerpen “*Mbok Jah*” yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh keluarga Mulyana, merasa dirinya menjadi beban keluarga. Dia merasa menjadi buruh tumpangan gratis. Melihat hal tersebut, *Mbok Jah* ingin menyampaikan keinginan untuk pulang kampung. Untuk mencapai keinginannya, tanpa konflik. Dalam musyawarah pertama, keinginan *Mbok Jah* untuk pulang kampung dipenuhi, tetapi dengan syarat pada waktu sekaten dan Lebaran harus kembali. Musyawarah kedua dilakukan keluarga Mulyana pada saat *Mbok Jah* tidak datang pada Sekaten pertama. Keluarga Mulyana kemudian menyusul ke desa dan melakukan musyawarah untuk mengajak ke kota.

“Kau ikut kami ke kota ya ? Harus ! Sekarang juga bersama kami “*Mbok Jah* tersenyum , tapi menggelengkan kepala.” Si *Mbok* tahu kalau anak-anakku menawarkan ini. Kalian anak-anakku yang baik. Tapi tidak. *Gus den Rara*, rumah si *Mbok* di hari tua ya disini. Nanti Sekaten saya pasti datang. Betul.” (MJ:31)

Musyawarah yang dilakukan dalam kedua cerpen tersebut berusaha mencapai kebulatan kehendak. Kedua tokoh sama sama bekerja sebagai pembantu. Sama-sama musyawarahnya dilakukan dua kali. Cerpen “Ke Solo ke Njati” tokoh dia musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan majikannya pupus di tengah jalan. Pada pihak majikan, setelah kegagalan dia pembantunya, dia masih menerima untuk bekerja kembali walaupun dengan kata-kata agak sinis. Cerpen “*Mbok Jah*”, setelah musyawarah dilakukan oleh *Mbok Jah* dan keluarga Mulyana untuk menyelesaikan permasalahan mudik, pihak keluarga Mulyana juga melakukan kerukunan dengan cara tersebut semata-mata untuk menciptakan keharmonisan .

o

Kebulatan kata yang dicapai lewat musyawarah akan menjamin bahwa keputusan yang hendak diambil akan tepat. Tujuan musyawarah agar setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya, dan tidak diambil keputusan dimana hanya satu pihak yang lebih unggul, sehingga semua pihak dapat menyetujui keputusan bersama. Secara ideal, Magnis Suseno (1996:51) menyatakan musyawarah adalah prosedur dimana semua suara dan pendapat didengarkan. Semua suara dan pendapat dianggap sama dan membantu untuk memecahkan masalah. Musyawarah berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau pikiran. Kebulatan ini merupakan jaminan kebenaran dan ketetapan keputusan yang mau diambil karena kebenaran termuat dalam kesatuan dan keselarasan kelompok yang bermusyawarah.

Dua tokoh, Dia (Cerpen "Ke Solo Ke Njati") dan *Mbok Jah* (Cerpen "Mbok Jah") berusaha menguasai kelakuan atau kepentingan dan tidak membiarkan suatu tabrakan terbuka sampai terjadi. Betapapun kedua pihak bertentangan tetapi mereka berusaha untuk menguasai agar selalu dapat mengontrol diri, dapat membawa diri dengan sopan, tenang, dan rukun. Konfrontasi terbuka dalam bentuk emosional adalah pandangan yang sangat tidak etis, membahayakan kehidupan bersama dalam masyarakat dan karena itu harus dicegah.

Kedua tokoh tersebut berusaha menerapkan pengelolaan kerukunan dalam mengemas permasalahan. Konflik yang akan terjadi mencoba kesampingkan dengan jalan musyawarah. Artinya, keterikatan pada kerukunan dari pihak-pihak yang berlawanan untuk melepaskan keinginan-keinginan pribadi

yang paling mungkin akan menimbulkan keresahan sosial terbuka. Musyawarah merupakan proses pertimbangan, pemberian dan penerimaan serta kompromis dimana semua pendapat harus dihormati.

Bentuk kerukunan ini sangat penting dalam menciptakan situasi keselarasan. Prinsip kerukunan yang dipegang masyarakat Jawa merupakan refleksi yang dihadapi. Prinsip ini mengenal nilai-nilai dan norma-norma, bagaimana menciptakan dan menyelaraskan konflik yang timbul sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan egoisme (*pamrih*). Magnis Suseno (1996:39), menyatakan bahwa prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmoni. Keadaan semacam ini disebut "rukun". Rukun berarti dalam keadaan selaras, tenang, dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu.

Cerpen "Ziarah Lebaran" menceritakan tentang Yusuf (tokoh utama) yang ditinggal istrinya (Siti) meninggal dunia dan kemudian menitipkan anaknya Eko di rumah mertuanya. Di Jakarta, Yusuf berkenalan dan kemudian jatuh cinta kepada Yati teman sejawatnya. Ketika dia kembali ke tempat ibu mertunya untuk mengunjungi Eko dan sekaligus menabur bunga dikuburan istrinya, dia bermaksud menyampaikan niatnya untuk kawin lagi dan memboyong Eko ke Jakarta. Tetapi ternyata Yusuf tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan hal itu kepada ibu mertuanya.

Yusuf melakukan kerukunan melalui nilai-nilai etis. Dimana pengelolaan selalu bersikap rukun didukung oleh nilai-nilai etis yang menuntut agar orang bersedia untuk merelakan kepentingannya. Yusuf yang sudah menduda tiga tahun,

merelakan keinginannya untuk mengawini Yati. Keinginannya untuk berumah tangga dan membawa Eko ke Jakarta ditanggihkan hanya sekedar tidak mau menyakiti hati ibu mertuanya.

“ Mungkin tahun depan, pada Lebaran, dia akan lebih punya nyali, punya keberanian yang lebih mantap lagi untuk mengemukakan itu semua kepada ibu mertuanya, Kepada Eko, bahwa dia akan mengawini Yati, bahwa dia akan menggendong Eko ke Jakarta. Ya, tahun depan pasti tekadnya. “ (ZL: 36).

Untuk menciptakan suasana rukun, Yusuf memadukan dengan prinsip hormat kepada ibu mertuanya. Hal ini adalah perwujudan dari kedudukan antara anak dan ibu. Ibu mertuanya yang telah menjaga dan mendidik anaknya semenjak kematian istrinya. Prinsip ini pada intinya mengacu pada cara berbicara dan pembawaan diri sesuai dengan tuntutan-tuntutan tata krama sosial.

“ Sudah Bu, Sudah cukup saya. Semuanya seperti biasa enak, *Nuwun*, Bu. “ Lho, kok sudah Sup. *Tumben*. “ (ZL:34)

Tindakan yang diambil Yusuf tersebut memegang dan melaksanakan “prinsip rukun”. Dalam pandangan masyarakat Jawa, selain “prinsip kerukunan”, diharapkan juga mengembangkan “prinsip hormat”. Prinsip ini merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkrit semua interaksi. Artinya, pola pergaulan masyarakat Jawa ini tidak terjebak pada tataran deskriptif yang berusaha melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tingkah laku yang diperbolehkan atau tidak, yang pada akhirnya tidak dapat memberi penilaian. Kerangka normatif yang dibangun mencoba mengangkat masalah-masalah moral. Menurut Bertens (1993:17), kerangka normatif berusaha melibatkan diri dengan menggunakan penilaian tentang perilaku manusia.

Berbeda lagi dengan cerpen "Marti". Pada cerpen ini, kerukunan dimaksudkan untuk keharmonisan keluarga. Marti (tokoh utama) dihadapkan dengan dilema, antara berlebaran di rumah dan di hotel sesuai dengan keinginan suaminya.

Cerpen "Marti" adalah cerita sepasang suami istri kelas menengah yang berdebat dan kemudian memutuskan untuk merayakan Lebaran di sebuah Hotel berbintang empat di pinggir pantai, agar tak terlalu repot dengan urusan silaturahmi dengan keluarga. Ketika memasuki kamar hotel, ternyata sudah ada parcel Lebaran penuh dengan makanan dan buah-buahan. Di sana ketahuan oleh Marti bahwa hotel dan liburan itu pun rupanya dibayar oleh rekan suaminya. Dia kemudian memilih untuk melewatkan waktunya dengan naik perahu bersama penumpang yang lain. Ternyata Marti dapat menemukan sama penumpang yang lain. Ternyata Marti dapat menemukan kembali 'keluarga' baru di atas perahu dipinggir pantai, sekalipun suaminya menghendaki liburan hanya untuk mereka berdua.

Marti melakukan kerukunan melalui kondisional psikis. Dia mengembangkan kemampuan tinggi untuk mencegah timbulnya konflik. Nilai-nilai keselarasan dan kerukunan, penolakan emosional terhadap segala bentuk konfrontasi.

" Ini ide yang absurd, pa. Masa Lebaran kok ke hotel ".

" *Why not ?* "

" Ya aneh, Lebaran itu untuk kumpul-kumpul sama sanak saudara. Bermaaf-maafan, *sungkem* dan kangen-kangenan sama ibu, keluarga. Yu Lies, makan enak jalan jalan sama kemenakan. Ini kita malah mau berduaduaan, nyepi di pinggir pantai."

Marti tidak mau melanjutkan bertukar pikiran lagi malam itu. Dia ingin memutuskan percakapan itu dengan " Oke, oke terserah mau mulah. "
(PK : 39-- 40)

Kesediaan psikis dan etis untuk menomorduakan kepentingan sendiri, memberikan kemungkinan untuk mengelak kebanyakan konfrontasi langsung. Pilihan Marti seakan-akan terpaksa, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga yang sudah dibina selama sepuluh tahun walupun belum dikarunai keturunan.

" Marti jengkel dengan suaminya. Laki-laki kalau sudah punya kemauan tidak mau di tawar, keluhnya. Saya ini disuruh menuruti kemauannya melulu gerutunya. Dan dia ingat kata-suaminya yang absurt tentang tidak mau berlebaran dengan keluarga. " (M : 40)

Walaupun pilihan yang diambil Marti terpaksa untuk menuruti kemauan suaminya, tetapi marti berusaha untuk menemukan kebahagiaan kembali pada waktu Lebaran. Dia mencari dan menemukan pada saat naik perahu bersama orang banyak dan anak-anak.

" tetapi Marti merasa senang melihat mereka bergembira di hari Lebaran begitu. Mereka berjubel, berdesakan, berebut untuk naik perahu layar. Anak-anak berjeritan bergembira. " (M:42--43)

Cerpen "Ziarah Lebaran" dan "Marti", tokoh utama melakukan pengelolaan wawasan kerukunan yang bersifat sekunder. Magnis Suseno (1985: 97) menyatakan bahwa kerukunan bersifat sekunder dimana kerukunan itu mungkin saja dipertahankan dengan cara pihak-pihak yang bertengkar saling menjauhi, atau diambil pencegahan dimana masalah itu ditunda dulu atau dengan cara satu pihak rela untuk mundur dari tuntutananya.

Kedua tokoh utama dalam cerpen "Ziarah Lebaran" dan "Marti" melakukan wawasan kerukunan dengan menomorduakan kepentingan, bahkan

untuk melepaskan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kesepakatan bersama. Hal senada juga diungkapkan oleh Jong (1985:19) yang mengatakan keselarasan itu tetap terjaga karena individu meniadakan konflik, sebab manusia Jawa dibentuk untuk menerima berbagai keadaan dengan rasa terima kasih. Tidak memberontak dalam menekankan pada pluralitas manusia itu sendiri. Sikap ini adalah pengejawantahan sikap *pamrih* yang harus perlu dicari oleh manusia dalam hal ini, Jong (1985:19) lebih lanjut menjelaskan bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah material tetapi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Bahkan orang yang sudah memiliki kekayaan material yang berlebihan pun hendaklah memiliki ini dengan sikap *pamrih* atau *nrima*. Jelas bahwa yang dipentingkan dalam sikap ini adalah rasa.

Artono, sekretaris merangkap *pimro* (pimpinan proyek), tokoh utama dalam acara cerpen "Raja Midas", melakukan tindakan dalam meredam konflik di kantornya dengan cara kerukunan. Walaupun yang dilakukan Artono melenceng dari aturan semestinya, yaitu dengan cara mendatangi Romo (dukun) untuk menghilangkan perasaan-perasaan kurang enak akibat gunjingan rekan-rekannya di kantor dan Pak Nugroho kepala bagiannya yang mengatakan bahwa dia sebagai Raja Midas.

Artono dianggap paling keren dan kaya dibandingkan Pak Nugroho yang paling tinggi jabatannya, mengalami konflik secara tidak langsung. Artinya, konflik yang terjadi datangnya dari perasaan sendiri yang diakibatkan alur pembicaraan orang lain. Dalam hal ini, pembicaraan tersebut tidak melibatkan secara langsung Artono sebagai obyeknya.

“ Mengapa Pak Artono bisa kaya begitu ? “ Tanya seorang karyawan. “ Itu karena takdirnya sudah begitu. Namanya saja sudah mendukungnya. Artono. Itu dari bahasa Jawa arto dan ono. Artinya uang dan ada. Dua Pak Artono itu akan selalu ada uang. Itu penjelasannya. “

“ Pak Atrono itu bukan sembarangan orang “.

“ Wah ! Bagaimana itu penjelasannya ? “

“ Dia itu kerasukan roh Raja Midas dari mitologi Yunani Kuna”.

(RM:58--59).

Pengelolaan konflik dan kerukunan dalam cerpen ini bersifat menyeluruh.

Kesertaan semua tokoh dalam mengemas situasi yang berpotensi timbulnya konflik dengan menciptakan keadaan selaras. Pak Nugroho memilih diam dan sedikit senyum bila berpapasan.

“ Bahkan mungkin Pak Nugroho, atasnya, mengetahui julukannya itu pula. Buktinya akhir-akhir ini Pak Nugroho agak terlalu murah senyum kepadanya bila berpapasan di kamar mandi. ” (RM : 60)

Rekan-rekannya di kantor menanggapi dengan *ke-cuek*-an tentang keberadaan Artono dan harta kekayaan yang dimiliki.

“ Waktu kembali lagi kekantornya beberapa hari kemudian didapati rekan-rekannya, Pak Nugroho, tampak biasa-biasa saja. Tidak seorang pun memanggilnya sebagai Raja Midas , seperti ditakutinya. ” (RM:61).

Tokoh bawahan (rekan-rekan di kantor dan Pak Nugroho) melakukan etika deskriptif, yaitu pelukisan tingkah laku moral dalam arti luar, misalnya anggapan-anggapan tentang baik buruk , tingkah laku yang diperbolehkan dan yang tidak. Artono menanggapi respon tersebut dengan cara etika normatif yaitu melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian terhadap dirinya sendiri.

Kedua etika yang diterapkan tersebut baik yang dilakukan tokoh utama maupun tokoh bawahan merupakan tindakan dalam usaha tidak mengganggu keselarasan. Hal ini merupakan alternatif utama yang harus dijaga sebelum menciptakan keselarasan. Artinya, wacana menciptakan mengandung pengertian

bahwa kerukunan pernah terganggu yang notabene pernah terjadi konflik di antara individu yang saling berkepentingan. Sardjono (1992:17) menyatakan bahwa ada dua segi dalam tuntutan kerukunan. Segi pertama tentang pandangan Jawa yang dalam penekanan arti selaras ini masalahnya bukan menciptakan keadaan selaras sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Segi kedua, prinsip kerukunan semata-mata bukan menyangkut suatu sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan sebagai penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Pengaturan-pengaturan hubungan sosial yang kentara harus dijaga dan konflik-konflik terbuka harus dicegah. Jadi prinsip kerukunan ini menuntut orang agar mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat.

Respon dan penilaian tingkah laku yang menonjol yang dialami Artono diwujudkan oleh sikap *cuek*. Sikap ini pada intinya menuntut bahwa dalam segala bentuk interaksi konflik-konflik terbuka harus dicegah dan bahwa dalam situasi pangkat dan kedudukan semua pihak yang bersangkutan harus diakui melalui sikap hormat yang tepat.

Dalam cerpen "Drs. Citraksi dan Drs. Citraksa", konflik muncul ketika *Pakde* dan *Bude Lurah Yaksatani* yang telah membesarkan dan mengongkosi pendidikan Bragalba hingga menjadi besar, berkunjung dengan ditemani sepupunya, Drs. Citraksi dan Drs. Citraksa. *Pakde* menginginkan Bragalba yang menjabat sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kerta Danawa dapat menampung sepupunya yang telah lulus S1 ilmu Politik, di birokrasi kabupaten .

" *Le*, saya dan ibumu minta tolong kepadamu untuk menampung kedua adikmu ini, si Citraksi dan Citraksa."

"Maunya bapak bagaimana?"

Ya sisip-sisipkan mereka di birokrasi dan kabupaten." (CDC:73)

Keinginan *Pakde* dan *Bude* membuat *Bragalba* dan istrinya pusing kepala. Sebuah keinginan untuk melihat karir anak-anaknya tidak terhenti di desa mereka saja. Dia ingin mereka keluar dari desanya untuk menjelajahi sebuah kemungkinan di kabupaten, propinsi kemudian ibu kota negara.

"Wah, bagaimana ini, Bu."

Ya, bagaimana, Pak. *Wong* ini kan sepupu-sepupumu. Ya harus ditolong to."

"Ya menolong sih menolong. Tetapi harus saya sisipkan di farmasi apa? Semua farmasi sudah penuh. Huh, kok yang mesti ditolong Citraksi dan Citraksa." (CDC:73--74)

Tekanan yang dialami *Bragalba* dari keinginan dan harapan *pakde*-nya akhirnya bermuara pada suatu tindakan yang berasal dari perasaan *isin* dan *sungkan*. Hal ini dilatarbelakangi oleh "sejarah" bahwa *Pakde* dan *Bude*-nya telah membesarkan dan membiayai pendidikan sampai menjadi orang. *Bragalba* juga dituntut untuk membalas jasa kedua orang tua angkatnya. Kedua prinsip kerukunan dan keselarasan itu menuntut agar dorongan-dorongannya sendiri senantiasa dikontrol. Impuls-impuls alamiah direm dengan tajam. Perasaan *isin* dan *sungkan* menuntut agar masing-masing selalu menempatkan penilaian-penilaian dan pertimbangan-pertimbangan di bawah persetujuan. Lewat perasaan tersebut, *Bragalba* mengabdikan harapan dari *Pakde*-nya.

"Baiklah, *pakde*, *bude*. Jangan khawatir tentang penempatan adik-adik Citraksi dan Citraksa. Akan saya usahakan betul."

Bapak dan ibu Lurah Yaksatani pamit sambil menepuk-nepuk kemenakan kesayangan mereka." (CDC:73)



Sebelum kata-kata persetujuan diambil oleh Bragalba, dia juga melakukan musyawarah dengan istrinya. Hal ini dilakukan untuk mendapat pertimbangan mengenai keinginan *Pakdē*-nya.

Pengelolaan yang dilakukan dalam Brangalba dan istrinya pada intinya menerapkan bentuk-bentuk kompromi tradisional dan diintegrasikan ke dalam tataran kelompok yang ada dari kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan sehingga tidak sampai timbul konflik. Magnis Suseno (1985:99), masyarakat Jawa mengusahakan pencegahan lewat musyawarah dalam pengambilan keputusan dengan berkonsultasi, penolakan emosional, dan menomorduakan kepentingan.

Tindakan dalam mengabdikan keinginan *Pakdē* merupakan tekanan-tekanan psikologis ditunjang secara moral oleh etika *sepi ing pamrih* dan *ramé ing gawé*. Artinya, bahwa setiap manusia diharapkan selalu mengembangkan sikap kerelaan untuk melepaskan kepentingan-kepentingannya sendiri dan untuk memenuhi kewajiban. Meskipun tindakan Bragalba berbau nepotisme, tetapi tindakan tersebut merupakan salah satu alternatif untuk menjaga kerukunan dan hubungan dengan keluarga atau orang tua.

Secara sosial Balgalba mengesampingkan nilai *pamrih*, karena tindakan ini tanpa memperhatikan terhadap keselarasan sosial. Sekaligus *pamrih*, memperlemah manusia dari dalam, karena siapa yang mengejar *pamrih*nya memutlakkan kekuannya sendiri. Meskipun Bragalba menjabat sebagai bupati, tetapi ia melihat kepentingan-kepentingan dari luar, yaitu permintaan dari pamannya walaupun tindakan dari Balgalba berbau nepotisme, tetapi inilah

perwujudan dari *sepi ing pamrih* dalam menjaga kerukunan. Selain itu, segi negatif dari *pamrih* adalah mencari kepentingan-kepentingannya dalam dunia dan dengan demikian mengikat diri pada alam luar sehingga ia kehilangan kesanggupan untuk memusatkan dalam kekuatan batin ke dalam dirinya sendiri. Soetrisno (1977:26) menyatakan bahwa *pamrih* kelihatan dalam tiga nafsu, yaitu orang yang selalu menjadi orang yang pertama (*nepsu, menangé dhéwé*), menganggap diri selalu benar (*nepsu, beneré dhéwé*), dan hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri (*nepsu, butuhé dhéwé*). Dalam mewujudkan kerukunan, maka keutamaan yang harus dikembangkan adalah memegang dan menciptakan *sepi ing pamrih*. Menurut Subagyo seperti yang dikutip Jatman (1997:36) bahwa *sepi ing pamrih* adalah perwujudan dari mawas diri antara egoisme dan egosentrisme. Tahap integrasi ini perlu diikuti dengan transformasi diri dengan latihan-latihan agar manusia menemukan identitas baru, ego baru, dan diakhiri dengan partisipasi manusia dalam kegiatan Ilahi.

Secara keseluruhan, kerukunan atau keselarasan pada cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen *PK* dipadukan lewat pengertian rasa. Keputusan-keputusan yang diambil tokoh utama dan tokoh bawahan dikelola lewat rasa sehingga kepentingan-kepentingan yang saling timbul tidak terjadi benturan.

Keputusan untuk kembali bekerja di rumah majikan yang dilakukan tokoh ibu dalam cerpen "Ke Solo Ke Jati", serta keputusan yang diambil Mbok Jah dalam cerpen "Mbok Jah" untuk datang ke kota pada waktu Sekaten dan Lebaran, dikelola lewat rasa dengan menghubungkan penginderaan fisik, emosi, dan penghayatan ke dalam yang hakiki. Dari pengelolaan ini tercipta suatu rangkaian

yang menghubungkan antara makna yang dangkal dengan taraf batin yang dalam. Kedua keputusan tersebut telah melahirkan kerukunan sehingga bentuk-bentuk konflik tidak terjadi.

Dalam cerpen "Ziarah Lebaran" keputusan yang diambil tokoh utama Yusuf lewat penggambaran pencerita bahwa dia (Yusuf) akan mengatakan untuk mengawini Yati dan menggendong Eko ke Jakarta tahun depan (Hal.: 36) adalah bentuk rasa. Yusuf menekankan pada "perasaan" dan "makna". Dua kandungan ini menjembatani keinginan yang muncul sehingga bisa menangkap kebenaran-kebenaran alam batiniah. Rasa yang diciptakan dalam kognisi psikologi ini melahirkan hubungan yang baik dengan ibu mertuanya, walaupun keinginan tersebut akan diutarakannya tahun depan.

Keputusan yang diambil oleh Marti dalam cerpen "Marti" untuk berlebaran di hotel sesuai dengan keinginan suaminya adalah pengelolaan lewat rasa. Keputusan ini diucapkan untuk menjaga keharmonisan kehidupan keluarga. Rasa ini merupakan intisari dari kehidupan emosional karena sebelum ada keputusan untuk berlebaran di hotel, terjadi perbedaan pendapat karena Marti menginginkan berlebaran di rumah bersama sanak saudara (Hal.:39). Hal ini menandakan adanya kontrol dan kontak dengan pribadi serta perasaan dalam mewujudkan arti kerukunan.

Pada dua cerpen terakhir, "Raja Midas" dan "Drs. Citraksi dan Citraksi", keputusan-keputusan yang diambil dari masing-masing tokoh merupakan refleksi dari pengelolaan perasaan yang sangat dalam. Artinya, kepentingan-kepentingan yang menyodok ke permukaan ditransformasikan ke dalam mikro kosmos, yaitu

perasaan intuitif. Arto no, dalam cerpen "Raja Midas" mengedepankan penilaian yang berlandaskan pada kerangka deskriptif daripada menanggapi gunjingan yang dilakukan oleh rekan-rekan kantornya, sedangkan Bragalba mengelola keinginan-keinginan dari pamannya untuk memasukkan keponakannya dalam birokrasi kabupaten dengan seperangkat kesadaran, yaitu batin dan rasa. Kedua hal ini untuk dipergunakan dalam menciptakan hubungan yang baik antara anak dan orang tua, Bragalba dan paman Bragalba mempergunakan rasa dalam menciptakan suatu "kontak perasaan" yang selaras dalam mengambil keputusan yang dilematis.

Rasa dalam kebudayaan Jawa memiliki peranan yang signifikan. Secara sosial budaya, nilai rasa dipergunakan untuk mengakomodasi dan mengelola kepentingan-kepentingan yang merupakan refleksi dari individu-individu yang saling bertentangan. Hal ini dalam usaha untuk menciptakan tatanan masyarakat yang selaras dan rukun.

Menurut Jatman (1997:26), rasa mempunyai beberapa ciri. Arti pokoknya ialah "air" atau "sari" buah-buahan atau tumbuhan. Dari situ berarti rasa adalah pengecapan, perasaan (perasaan cinta, marah, belas kasih, kemesraan); lalu rasa juga berarti sifat dasar dari seorang manusia.

Kemampuan rasa yang dicapai dalam keenam cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen *PK* tersebut merupakan kerangka normatif dan juga kekuatan psikologi kognitif dalam menjaga keseimbangan dalam hidup. Stange (1998:11) menyatakan bahwa rasa itu adalah substansi sekaligus hakikat dari apa yang diterima atau dipahami dan alat getar atau bagian tubuh yang menerimanya.

Dalam pembahasan cerpen-cerpen tersebut, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, pengarang membuat *ending* bahwa hubungan antara manusia selalu berakhir dengan harmoni, kerukunan, bukan dengan konflik. Kedua, ada dua macam bahaya yang mengancam cara hidup manusia, yaitu nafsu-nafsu (hawa nafsu) dan egoisme (*pamrih*). Dua prinsip ini merupakan norma yang dapat menggagalkan kerukunan. Oleh karena itu, manusia dapat mengontrol nafsu-nafsunya dan melepaskan *pamrih*-nya. Menurut Magnis Suseno (1996:39--140), nafsu-nafsu adalah perasaan-perasaan kasar karena menggagalkan kontrol diri manusia dan membelenggunya secara buta pada dunia luar. Adapun *pamrih* adalah suatu usaha kepentingan sendiri individunya saja dengan tidak menghiraukan kepentingan-kepentingan orang lain.

Atas dasar pertimbangan itu dapat dimengerti, mengapa masyarakat Jawa merasa berkepentingan untuk melindungi kerukunan melebihi tuntutan keras agar segenap pihak menguasai diri, menjaga suasana rukun dan mengakui kedudukan masing-masing pihak. Konsep pandangan etika Jawa memberi tekanan utama pada keutamaan yang membangun disposisi kehendak untuk selalu menjaga kerukunan dalam masyarakat. Jadi, disposisi-disposisi untuk menjauhi konflik dan menciptakan keharmonisan. Keutamaan-keutamaan itu adalah untuk membatasi diri (*sepi ing pamrih*) dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing dengan setia (*ramé ing gawé*).

Dua keutamaan dasar etika Jawa itu mempunyai ciri teoretis. Pertama, keutamaan itu bersifat formal dan negatif. Artinya, tidak dikatakan sikap mana yang dituntut melainkan sikap mana yang harus dicegah. Yang dituntut adalah

kesediaan hati dan bukan sikap tertentu. Kedua, kesediaan untuk membatasi diri dengan harapan-harapan masyarakat.

Jadi, kemampuan tradisional untuk *sepi ing pamrih* dan merelakan kata sepakat dalam semangat rukun ternyata tetap merupakan unsur hakiki dalam suatu pengelolaan konflik yang efektif dan wajar. Sementara itu, dalam wawasan masyarakat Jawa ada "etika" konflik dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yaitu lewat jalur perdamaian, keselarasan atau kerukunan. Nilai sosial fundamental ini pada dasarnya akan membawa kelanjutan kehidupan pada pengertian-pengertian sesuai dengan kenyataan.

3.3 Implikasi Cerpen-cerpen dalam Kumpulan Cerpen *Parta Krama* terhadap Kehidupan Masyarakat

Keterlibatan sastra dalam kehidupan sosial menampakkan adanya jalinan yang kuat antara sastra, budaya, dan masyarakat. Peranan sastra sendiri adalah melalui diri pengarang menerjemahkan realita menjadi realita imajiner. Jelas bahwa karya sastra merupakan sarana pengarang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu realita, meskipun muatan yang tertuang dalam karya sastra itu merupakan penciptaan kembali sebuah peristiwa sejauh yang terkonstruksi dari pengetahuan dan daya imajinasi pengarang

Sastra adalah kesadaran kolektif. Angkatan Balai Pustaka (BP) tidak mungkin diterima, andaikata pada waktu itu tidak ada kesadaran mengenai kelapukan adat Minang. Sastra Pujangga Baru (PB) juga merupakan kesadaran kolektif para cendekiawan pada waktu itu. Lepas dari apakah mereka harus menengok ke Barat atau ke Timur seperti yang tercermin dalam "Polemik

Kebudayaan", para pemikir pada waktu itu berhasrat untuk memperoleh kemajuan.

Dari pemikiran demikian, memberikan pelabelan bahwa sastra adalah sebuah aksiomatik. Kebenaran yang terkandung dalam karya sastra merupakan hasil dari proses intuitif, bukan sesuatu yang kita ciptakan melainkan hanya mungkin kita temukan. Keberadaan aksiomatik sama halnya dengan kita menyerahkan diri pada esensi suatu makna. Jika karya sastra tanpa menghadirkan aksioma, maka hal ini pada dasarnya justru hendak menjauhkan (*defamiliarisasi*) pada penilaian-penilaian yang serba hitam putih, sebab karya sastra dengan bermacam kelenturan bahasa tidak bisa diadili oleh sifat penilaian berdasarkan perbedaan.

Dari paparan tersebut, dapat ditarik sebuah "benang merah" bahwa karya sastra yang sanggup mengembangkan kebudayaan adalah sastra yang sanggup mengangkat antara dengan apa yang seharusnya terjadi. Sastra yang mempunyai guna adalah sastra yang dengan jitu mengangkat "korban" keadaan. Di sini hubungan antara dunia rekaan pengarang dengan kenyataan merupakan suatu interaksi, saling mempengaruhi atau kaitan dwiarah (Teeuw, 1984:229). Dengan demikian, mekanisme penelaahan itu akan menampakkan kecenderungan berpindah-pindah antara kenyataan dan rekaan.

Umar Kayam melalui cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen *PK* telah mengungkapkan pandangan dunia pengarangnya terhadap masyarakat Jawa, khususnya menyingkapi mengenai konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Situasi yang berpotensi melahirkan konflik dikelola lewat jalan budaya Jawa, yaitu kerukunan dan musyawarah.

Peristiwa pada cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen *PK* merupakan gambaran kehidupan tokoh yang mengandung nilai sosial tertentu, sehingga sifat fiksionalitas tersebut merupakan bahan untuk memberi makna kehidupan atas cerpen-cerpen tersebut. Setiap peristiwa dan perilaku tokoh dapat dianggap sebagai pola-pola sosial. Dalam pengertian yang lain, peristiwa dan perilaku tokoh merupakan fakta sosial yang tercermin dalam cerpen. Tidaklah berlebihan jika kemudian sastra dianggap sebagai "cermin" kehidupan masyarakat.

Enam dari delapan cerpen dalam kumpulan cerpen *PK* yang diteliti, ada empat cerpen yang mengisahkan mengenai "Lebaran" dan dua cerpen mengenai "Birokrasi." Dalam cerpen tentang Lebaran, tokoh-tokoh cerpen memandang begitu penting dan sakral peristiwa tersebut. Tradisi mudik yang gagal (cerpen "Ke Solo Ke Njati"), pengharapan untuk berkumpul dengan saudara (cerpen "Mbok Jah"), pengharapan untuk memulai kehidupan baru (cerpen "Ziarah Lebaran"), dan kerinduan untuk berkumpul sanak saudara yang gagal (cerpen "Marti"). Lebaran atau *Riyaya* menurut Geertz adalah hari besar yang paling penting untuk kultur Jawa. Diantara hari besar Islam lainnya, *Riyaya*, menurut Geertz (1989:509) lebih lanjut adalah yang paling nasionalis. Ia menandakan realitas dan kemungkinan tercapainya kesatuan budaya dan kemajuan sosial yang terus bersinambung.

Cerpen tentang birokrasi, skala prioritas lebih ditujukan pada praktek-praktek birokrasi yang berbau KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Pegawai

yang kaya melebihi dari atasannya (Cerpen "Raja Midas"), dan seorang Bupati yang memasukkan sepupunya di birokrasi kabupaten (cerpen "Drs. Citraksi dan Drs. Citraksa").

Dalam pandangan dunia pengarang, Umar Kayam memfokuskan pada pengemasan permasalahan yang berpotensi membentuk konflik lewat nilai rasa. Prinsip ini telah memberikan andil yang cukup berarti demi terciptanya keharmonisan terhadap keadaan dalam keluarga dan lingkungan sosial. Dari keenam cerpen yang diteliti, ada tiga nilai moral yang sangat signifikan untuk meredakan konflik yang timbul. Nilai-nilai tersebut mempunyai keterkaitan dan berimplikasi secara langsung terhadap kehidupan bermasyarakat saat ini, yaitu : kerukunan, musyawarah, serta sikap mawas diri dan menguasai emosi.

Dalam kerukunan, keadaan-keadaan yang dapat memicu timbulnya konflik dikelola sedemikian rupa dengan nilai-nilai keadilan yang berdasarkan rasionalitas. Keadaan demikian dinilai lebih efektif, sehingga orang-orang yang memiliki kepentingan bisa menyelaraskan atau paling tidak menomorduakan kepentingan sendiri. Hal ini selain untuk menghindari perpecahan (konflik terbuka) yang akan mengendalikan dari ketegangan dan pertentangan secara adil. Keenam cerpen dalam kumpulan cerpen *PK*, konflik yang terjadi dapat dikategorikan dalam konflik sekunder, yaitu yang lebih mengutamakan ketentraman. Di sini pihak-pihak yang bertentangan saling menjauhi, atau diambil pemecahan dimana masalah itu ditunda atau dengan cara satu pihak rela untuk mundur dari tuntutananya. Dalam cerpen "Ziarah Lebaran", Yusuf menunda

dengan mengatakan pada ibu mertuanya mengenai keinginan untuk mengawini Yati.

“ Mungkin tahun depan, pada Lebaran lagi, dia akan lebih punya nyali, punya keberanian yang lebih mantap lagi untuk mengemukakan itu semua kepada ibu mertuanya kepada Eko. Bahwa dia akan mengawini Yati, bahwa dia akan menggendong Eko ke Jakarta. Ya, tahun depan. Pasti, tekadnya. “ (ZL:36).

Dalam cerpen “Marti”, Marti menunda untuk berlebaran di rumah bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Dia menuruti keinginan suaminya untuk berlebaran ke hotel.

“ Marti tidak mau melanjutkan bertukar pikiran lagi malam itu. Dia ingat memutuskan percakapan itu dengan “ Oke, oke, terserah maumlah. “ (M:40)

Dalam cerpen “Raja Midas”, rekan rekan Antono mengambil kerukunan dalam menghadapi permasalahan yang timbul di kantor.

“ Waktu kembali lagi ke kantornya beberapa hari kemudian didapatinya rekan-rekannya, Pak Nugroho, tampak biasa-biasa saja. Tidak seorang pun memanggil dengan Raja Midas, seperti ditakutinya. “ (RM:61)

Kerukunan berarti semua tanda ketegangan antarpribadi harus dihilangkan sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dengan baik. Kerukunan mengandung usaha terus menerus oleh semua individu untuk bersikap tenang dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan atau keresahan. Keempat cerpen tersebut, tuntutan kerukunannya adalah mencegah terjadinya ketegangan, maka sekurang-kurangnya jangan sampai diperlihatkan. Sekurang-kurangnya pada semua interaksi harus kelihatan tenang dan rukun. Wacana kerukunan demikian bersifat negatif, yang lebih mengutamakan keselarasan atau harmoni yang setidaknya sudah ada. Menurut Magnis Suseno

(1985:96), kerukunan negatif menuntut pencegahan segala kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketegangan dalam masyarakat. Kerukunan negatif ini timbul karena dalam perspektif Jawa bahwa ketegangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu.

Kedua, musyawarah merupakan langkah yang rasional dalam proses pengambilan keputusan dengan jalan berkonsultasi. Bentuk musyawarah bersama mencapai kebulatan kehendak, kebulatan dimana menjamin bahwa keputusan yang hendak diambil akan tepat. Kepentingan-kepentingan tiap individu yang berseberangan dipertemukan dalam wahana mencari titik temu guna memutuskan suatu hakikat gagasan universal. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang berpotensi memunculkan menang dan kalah, kuat dan lemah, dihilangkan, tetapi menitikberatkan pertimbangan pada skala prioritas tidak merugikan kedua belah pihak dan keselarasan.

Cerpen "Ke Solo ke Njati" dan cerpen "Mbok Jah" tokoh utama dan bawahan melakukan musyawarah dua kali dalam menyelesaikan permasalahan mengenai mudik pada hari Lebaran.

" Mbok kamu jangan pulang Lebaran. Tahun ini, anak-anak saya pada kumpul disini. Banyak kerjaan. "

" Wah, *nuwun sewu*, Bu. Saya sudah terlanjur janji anak-anak."

" Kalau kamu tidak mudik dan tetap masuk pasti banyak persen dari tamu-tamu. Ya, tidak usah pulang

" Wah, *nuwun sewu*, Bu. Saya sudah terlanjur janji anak-anak. " (KSKN:19)

"Keputusan Mbok jah sudah mantap. Tidak mau menjadi beban sebagai kuda tua yang tidak berdaya. Hingga jauh malam mereka tawar menawar. Akhirnya diputuskan satu jalan tengah. " (MJ:26)

Tokoh-tokoh di dalam kedua cerpen tersebut melakuakn musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam hal itu, setiap orang bisa mengemukakan pendapat, agar tidak diambil keputusan yang hanya satu pihak dapat menyetujui keputusan bersama.

Keberadaan musyawarah ini dinilai lebih akomodatif karena semua pihak secara ideal didengarkan. Apa saja dikemukakan diharapkan sama benar dan dipergunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini pada dasarnya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi konfrontasi dengan orang lain. Sikap-sikap seperti konfrontasi langsung dalam masyarakat Jawa tidak dibenarkan, karena bentuk tersebut akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang berakibat fatal pada kedua belah pihak.

Kerukunan dan musyawarah tidak dapat terlaksana dengan baik apabila individu yang menjalankan berada dalam keadaan *liminal* yaitu suatu keadaan ambigu terpisahnya subyek ritual secara fisik dari manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan psikologis ini akan mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Jawa mengembangkan norma kelakuan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya emosi yang bisa menimbulkan konflik. Untuk menjebatani kerukunan dan musyawarah perlu adanya sikap mawas diri dan menguasai emosi. Sikap ini akan mengkomadasikan dan mengontrol perasaan dalam tingkah laku masyarakat. Orang diharapkan selalu bersikap tenang, untuk tidak bingung, dan tidak menunjukkan rasa kaget. Segala tindak tanduk diperhatikan sehingga tidak terjadi

ketegangan yang akan meruncing pada pertikaian atau perpecahan dalam lingkungan masyarakat.

Kerukunan dan musyawarah yang dilakukan tokoh utama dan bawahan selalu direlasikan pada penempatan diri yang bermuara pada mawas diri dan penguasaan emosi. Emosi yang muncul dari kepentingan dikuasai sedemikian rupa dengan hati-hati dalam memutuskan suatu gagasan yang sangat signifikan. Masalah-masalah mudik yang gagal, pengharapan berkumpul dengan saudara, keinginan memulai kehidupan baru, dan keadaan dilematis untuk membantu orang tua angkat. Permasalahan tersebut dikemas dalam sikap mawas diri dan penguasaan emosi.

Suatu konflik akan pecah apabila saling bersentuhan, maka hal ini dituntut agar individu bersedia menomorduakan kepentingan. Interaksi yang terjadi tersebut, secara tidak langsung memasukkan unsur musyawarah untuk mencari kata sepakat. Mawas diri dan sikap penguasaan emosi memegang peranan fundamental untuk mengontrol psikologis massa dalam meredam kepentingan individu yang prinsipil muncul.

Ketiga nilai yang berimplikasi terhadap masyarakat dapat ditemukan dari pandangan dunia pengarang sangat efektif untuk mengelola konflik dan menghilangkan disharmoni dalam keluarga.

Secara garis besar, cerpen-cerpen Umar Kayam yang terangkum dalam kumpulan cerpen *PK* menceritakan sisi-sisi kehidupan keluarga yang didapat adanya permasalahan. Keadaan demikian kalau dibiarkan terus-menerus bukan tidak mungkin akan mencapai klimaksnya dan pada akhirnya akan membuka

terjadinya konflik terbuka. Keadaan emosional yang menguasai akan mengakibatkan benturan-benturan, sehingga akan terjadi ketegangan, keretakan, bahkan perceraian dalam tubuh keluarga. Misalnya, dalam cerpen "Marti", secara konkret, konflik timbul karena ketegangan suami istri dalam melakukan Lebaran dan kurang harmonisnya perkawinan karena belum mempunyai keturunan.

" Ini ide yang absurd, Pa. Masa Lebaran kok di hotel. "

" *why not* . "

" Ya aneh. Lebaran itu untuk kumpul-kumpul sama sanak saudara, bermaaf-maafan, *sungkem* dan kangen-kanganan sama ibu. " (M:39)

Dalam cerpen ini terdapat bentuk-bentuk hiperorganisasi, yaitu peranan *patriarkalisme* yang begitu dominan dan hubungan perkawinan yang tegang, yang tidak senang (Polak, 1985:375--376). Tidak adanya wahana untuk mengelola atau minimnya kesadaran pribadi dalam mengontrol emosi yang timbul dari persoalan yang bersinggungan. Pada titik tertentu akan melahirkan bentuk-bentuk disharmonis; memaksa, mcrampas, dan saling mengalahkan antarkepentingan. Stereotip seperti ini lebih lanjut akan membentuk konflik yang lebih besar dan sangat komplek, yaitu suatu konflik murni yang hanya dapat berakhir dengan kematian satu pihak.

Kerukunan, musyawarah serta sikap mawas diri dan menguasai emosi digambarkan secara nyata dalam cerpen-cerpen tersebut untuk mencairkan konflik. Dilihat dari segi manfaat, nilai moral yang terkandung dalam keenam cerpen tersebut memiliki kekuatan untuk menetralsir gejala yang timbul, baik yang ada dalam keluarga, masyarakat atau permasalahan yang berhubungan dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Tiga kata kunci tersebut secara pragmatis memiliki kekuatan dalam menangkal, meredam, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara kompleks, Artinya, permasalahan-permasalahan yang sudah secara langsung menyangkut dengan kepentingan individu maupun permasalahan yang sudah berada pada garis konflik terbuka dan murni. Wahana konflik seperti ini sangat berpotensi bagi timbulnya disintegrasi serta sikap tindakan yang irasional. Bukan tidak mungkin akan terciptanya hukum rimba. Siapa yang kuat pasti menang dan siapa yang lemah pasti kalah.

Seperti halnya beberapa peristiwa yang memiliki korelasi dengan SARA yang belakangan terjadi, baik yang terjadi di Ketapang, Ambon, Timor-Timur, dan Sambas telah banyak memakan korban baik harta maupun nyawa karena permasalahan tersebut telah menjadi konflik murni. Pertentangan antara beberapa kepentingan sehingga memunculkan emosi-emosi tradisional, kelakuan-kelakuan beringas, dan sikap-sikap tidak menghargai, telah menjadi pandangan yang amat sensitif. Beberapa dorongan tersebut tidak memiliki muara yang nyata sehingga keadaan itu memungkinkan akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga (provokator) guna memperkeruh keadaan. Saling menghasut, memanas-manasi permasalahan, dan membolak-balikan realita. Hal ini perlu kita waspadai dengan hati-hati, karena tidak mungkin akan terjadi ketegangan, permusuhan, perpecahan, atau masalah peperangan antara anggota keluarga, teman, antarsuku, antaragama, anggota masyarakat atau anggota struktur-struktur sosial yang dalam naungan negara. Ledakan-ledakan antarkomponen masyarakat tersebut perlu adanya interaksi yang berupa komunikasi secara horisontal untuk mencari arti kata damai

menciptakan harmonis, keselarasan, dan mengindahkan arti disharmonis yang selalu menghantui.

Permasalahan-permasalahan yang “menjamur”: di era reformasi seperti ini, perlu adanya “kata kunci” untuk meredam dan mengkompetensikan lewat pandangan dari etika kerukunan musyawarah, serta mawas diri dan menguasai emosi. Tiga nilai signifikan ini setidaknya akan mengurangi pertentangan, perselisihan, konfrontasi langsung maupun konflik murni.

Pandangan ini lebih mengutamakan pada nilai-nilai keadilan, rasional, etis secara efektif dan menjauhkan dari paradigma-paradigma yang bisa mengacaukan suasana kerukunan yang sudah dibangun dalam tatanan-tatanan kehidupan.

BAB IV

PENUTUP